# KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANGANAN KECELAKAAN KAPAL OLEH MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN MARITIM DI INDONESIA

**TESIS**

**Oleh:**

**MUSTARI EFENDI**
**2402198046**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**
**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**
**JAKARTA**
**2026**

# KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANGANAN KECELAKAAN KAPAL OLEH MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN MARITIM DI INDONESIA

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Magister Hukum (M. H.) Pada Program Studi Hukum
Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

**Oleh:**

**MUSTARI EFENDI**
**2402198046**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**
**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**
**JAKARTA**
**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Mustari Efendi

NIM : 2402198046

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Kepastian Hukum Dalam Penanganan Kecelakaan Kapal Oleh Mahkamah Pelayaran Sebagai Lembaga Peradilan Maritim Di Indonesia" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yangpernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 2 Februari 2026




Mustari Efendi

NIM: 2402198046

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

## HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

## KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANGANAN KECELAKAAN KAPAL OLEH MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN MARITIM DI INDONESIA

Oleh :

| | |
|---|---|
| Nama | : Mustari Efendi |
| NIM | : 2402198046 |
| Program Studi | : Magister Hukum |
| Peminatan | : Hukum Bisnis |

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 2 Februari 2026
Menyetujui,

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H,. M.BA. | Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. |
| NUPTK : 6358738639130043 | NUPTK : 5434757658137093 |

| Ketua Program Studi Magister Hukum, | Dekan Fakultas Hukum, |
|---|---|
| Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. | Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. |
| NUPTK : 1237749650130140 | NUPTK : 5434757658137093 |

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 2 Pebruari 2026 telah diselenggarakan sidang tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Mustari Efendi
NIM : 2402198046
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul : "Kepastian Hukum Dalam Penanganan Kecelakaan Kapal Oleh Mahkamah Pelayaran Sebagai Lembaga PeradilanMaritim Di Indonesia" oleh tim Penguji yang terdiri dari:

| Nama Penguji | Jabatan dalam Tim Penguji | Tanda Tangan |
|---|---|---|
| 1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA | Sebagai Ketua | |
| 2. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. | Sebagai Anggota | |
| 3. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. | Sebagai Anggota | |

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

## Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Mustari Efendi |
| NIM | : 2402198046 |
| Program Studi | : Magister Hukum |
| Fakultas | : Hukum |
| Jenis Tugas Akhir | : Tesis |
| Judul | : Kepastian Hukum Dalam Penanganan Kecelakaan Kapal Oleh Mahkamah Pelayaran Sebagai Lembaga Peradilan Maritim Di Indonesia |

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 2 Februari 2026




Mustari Efendi
NIM: 2402198046

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya, Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn, Selaku Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia
2. Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
3. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. sebagai Dosen Pembimbing Pertama.
4. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus Dosen Pembimbing Kedua .
5. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Dosen Penguji.
6. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia
7. Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas ilmu, wawasan, dan inspirasi yang diberikan selama masa perkuliahan.
8. Kepada Pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, terima kasih atas masukan dan dukungan nya selama penulis melakukan penelitian ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan.

Jakarta, 2 Februari 2026

Penulis

Mustari Efendi

NIM: 2402198046

**DAFTAR ISI**


LEMBAR JUDUL ..... i
HALAMAN PERNYATAAN ..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ..... iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... v
KATA PENGANTAR ..... vi
DAFTAR ISI ..... vii
ABSTRAK ..... ix
*ABSTRACT* ..... x
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan masalah ..... 9
C. Tujuan Penelitian ..... 9
D. Kegunaan Penelitian ..... 10
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep ..... 10
1. Kerangka Teori ..... 10
2. Kerangka Konsep ..... 16
F. Metode Penelitian ..... 17
G. Orisinalitas Penelitian ..... 21
H. Sistematika Penulisan ..... 23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 26
A. Landasan Teori ..... 26
1. Teori Kepastian Hukum ..... 26
2. Teori Sistem Hukum ..... 30
B. Tinjauan umum tentang Pelayaran ..... 37
C. Tinjauan ummum tentang Mahkamah Pelayaran ..... 42
BAB III PERANAN MAHKAMAH PELAYARAN DALAM MENANGANI KECELAKAAN KAPAL SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA YANG BERKEPASTIAN HUKUM ..... 57

A. Kecelakaan Kapal ..... 57
B. Prosedur Pemeriksaan Kapal ..... 67
C. Keberadaan Mahkamah Pelayaran Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia..... 73
D. Regulasi Mahkamah Pelayaran dalam Perspektif Kepastian Hukum ..... 87
BAB IV PENGATURAN MAHKAMAH PELAYARAN MENJADI LEMBAGA PERADILAN MARITIM ..... 94
A. Pengaturan Hukum Mahkamah Pelayaran ..... 94
B. Mahkamah Pelayaran menjadi Lembaga Peradilan Maritim ..... 106
BAB V PENUTUP…… ……..….113
A. Kesimpulan ..... 113
B. Saran ..... 114
DAFTAR PUSTAKA ..... 115

# ABSTRAK

**Judul : Kepastian Hukum Dalam Penanganan Kecelakaan Kapal Oleh Mahkamah Pelayaran Sebagai Lembaga Peradilan Maritim Di Indonesia**

Tingginya intensitas aktivitas pelayaran di wilayah perairan Indonesia tentu membuka kemungkinan meningkatnya jumlah kecelakaan dalam lalu lintas laut, sehingga diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan pemeriksaan terhadap kecelakaan dalam lalu lintas pelayaran tersebut. Kondisi ini menjadi semakin kompleks oleh belum adanya peradilan maritim khusus di Indonesia yang memiliki kewenangan yudisial penuh untuk menangani seluruh aspek hukum kecelakaan kapal, baik administratif, pidana, maupun perdata. Mahkamah Pelayaran hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa lanjutan dan penegak kode etik profesi pelaut dengan putusan sanksi administratif, sedangkan aspek pidana dan perdata harus diselesaikan di lembaga peradilan umum, yang seringkali tidak memiliki kompetensi khusus di bidang maritim.

Jenis penelitian yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalahPenelitian ini menggunkan metode pendekatan perundang-undangan (*satute approach)* dan pendekatan konseptual (*conseptual approach)*. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*satute approach)* dikarenakan, pendakan ini akan digunakan untuk mengetahui segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik hukum pada penelitian ini.

Sebagai Kesimpulan, **pertama** Mahkamah Pelayaran berperan strategis dalam menegakkan disiplin profesi pelaut, meningkatkan keselamatan pelayaran, serta memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam kecelakaan kapal. Melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 jo. PM 30 Tahun 2022, Mahkamah Pelayaran berfungsi untuk menemukan sebab-sebab kecelakaan, menentukan pihak yang bertanggung jawab, serta memberikan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri Perhubungan. **Kedua**, Keberadaan Mahkamah Pelayaran dalam sistem hukum Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Kedudukannya yang masih berada di bawah Kementerian Perhubungan menimbulkan permasalahan struktural dan fungsional karena menjadikan lembaga ini berada dalam lingkup eksekutif bukan yudikatif. Adapun Kelemahan substansi hukum yang terdapat dalam peraturan yang ada, memperlihatkan belum adanya kejelasan mengenai batas kewenangan Mahkamah Pelayaran apakah bersifat administratif atau peradilan


Kata Kunci : Kepastian Hukum, Mahkamah Pelayaran, Kecelakaan Kapal

## *ABSTRACT*

***Title: Legal Certainty in the Handling of Ship Accidents by the Maritime Court as a Maritime Judicial Institution in Indonesia***

*The high intensity of shipping activities in Indonesian waters certainly opens up the possibility of an increase in the number of accidents in maritime traffic, thus requiring regulations governing the investigation of accidents in maritime traffic. This situation is further complicated by the absence of a special maritime court in Indonesia with full judicial authority to handle all legal aspects of ship accidents, whether administrative, criminal, or civil. The Maritime Court only acts as a further review body and enforcer of the professional code of conduct for seafarers with administrative sanctions, while criminal and civil aspects must be resolved in general courts, which often lack specialised maritime expertise.*

*The type of research used in the preparation of the thesis is normative legal research (normative legal research method). Normative legal research is a process of searching for regulations, principles, or legal doctrines to resolve issues. This research uses the statute approach and conceptual approach. The researcher uses the statutory approach because this approach will be used to identify all laws and regulations related to the legal topic of this research.*

*In conclusion, firstly, the Maritime Court plays a strategic role in enforcing professional discipline among seafarers, improving maritime safety, and providing legal certainty to parties involved in shipping accidents. Through the preliminary and follow-up examination mechanisms as stipulated in Minister of Transportation Regulation No. PM 6 of 2020 in conjunction with PM 30 of 2022, the Maritime Court serves to determine the causes of accidents, identify the responsible parties, and provide recommendations for administrative sanctions to the Minister of Transportation. Second, the existence of the Maritime Court in the current Indonesian legal system does not fully reflect the principle of the rule of law as mandated by Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Its position, which is still under the Ministry of Transportation, causes structural and functional problems because it places this institution within the executive rather than the judicial sphere. Furthermore, the substantive legal weaknesses found in existing regulations reveal a lack of clarity regarding the scope of the Maritime Court's authority, whether it is administrative or judicial in nature.*



***Keywords: Legal Certainty, Maritime Court, Ship Accidents***